

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP**

SKRIPSI



OLEH :

RIZQULLAH RAFIE ANANDA
NIM: 1312100053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI
TRIUMVIRAT¹ SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP**

SKRIPSI



Oleh:

RIZQULLAH RAFIF ANANDA

NIM: 1312100053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP**

SKRIPSI



Oleh:

RIZOULLAH RAFIF ANANDA

NIM: 1312100053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZOULLAH RAFIF ANANDA

1312100053

Dosen Pembimbing:


Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP: 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP**

Oleh:

RIZQULLAH RAFIF ANANDA

NIM : 1312100053

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 20 Desember 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :

Tanggal :

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130611**

**Sekretaris : Dipo Wahjoeono S.H., M.Hum.
NPP/NIP: 20310880149**

**Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP/NIP: 20310230880**

.....
.....
.....

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



.....

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqullah Rafif Ananda

NIM : 1312100053

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI TRIUMVIRAT
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Rizqullah Rafif Ananda

NIM: 1312100053

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqullah Rafif Ananda

NIM : 1312100053

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

“PERTANGGUNGJAWABAN MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Rizqullah Rafif Ananda

NIM: 1312100053

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqullah Rafif Ananda

NIM : 1312100053

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI TRIUMVIRAT
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang me



Rizqullah Rafif Ananda

NIM: 1312100053



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqullah Rafif Ananda
NBI/ NPM : 1312100053
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENTERI TRIUMVIRAT
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM KEADAAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang me



Rizqullah Rafif Ananda

NIM: 1312100053

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan tulus, skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta:

Masfuad dan Elfie Dwirosi Yoenia

yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moral maupun materi, serta menjadi inspirasi dalam setiap langkah hidup Penulis.

Untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat di mana saya ditempa dan dibimbing untuk memahami ilmu hukum dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Tidak lupa untuk diri saya sendiri, atas perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk terus melangkah meski tantangan sering kali menghadang. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kedudukan dan Kewenangan Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan dalam Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap*" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini maupun selama masa studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

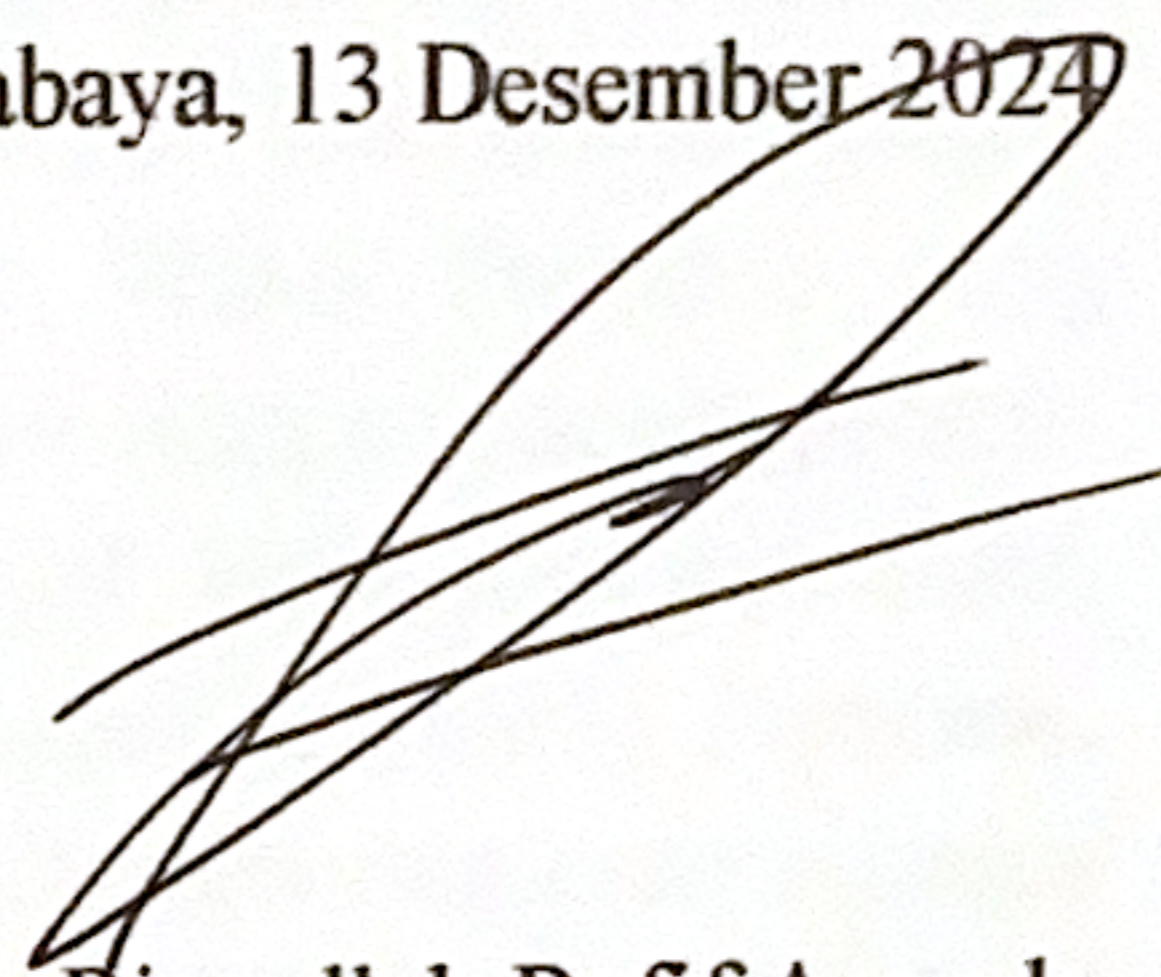
1. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran bersedia menjadi Dosen Pembimbing. Beliau senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan yang tak kenal lelah, serta berbagi ilmu yang sangat berharga. Dukungan beliau tidak hanya membantu Penulis dalam memahami dan menyusun skripsi ini, tetapi juga memberikan kerangka berpikir yang jelas dan runtut, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam akademik maupun non akademik selama masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dalam proses studi, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu saya dalam proses administrasi dan memberikan informasi selama menjalani serta menyelesaikan perkuliahan.
8. Penguji Proposal Skripsi, Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua, Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris, dan Bapak Sultoni Fikri, S.IP. S.H., M.H., selaku Anggota yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap skripsi Penulis.
9. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa batas sepanjang perjalanan hidup. Penulis sangat menghargai segala bentuk pengorbanan, kesabaran, dan usaha yang telah dicurahkan dalam mendidik serta membimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan atas doa dan dorongan yang tiada henti, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Nurma Chrismawantika Herlambang yang telah menjadi pendukung setia dalam hidup penulis diberbagai keadaan susah maupun senang. Terima kasih atas bantuannya selama ini karena tanpa bantuan itu mungkin sulit untuk penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan ini. Terima kasih sudah mau sabar dalam menghadapi segala ucapan dan tindakan penulis yang terkadang membuat kesal. Segala momen tersebut akan selalu terkesan.
11. Fahmi Nugraha, Agung Wicaksono, Rival Bramasta selaku teman penulis yang memberikan dukungan yang tak kenal waktu dalam berbagai macam bentuk. Terima kasih sudah menemani waktu sempit maupun luang dan mengurangi kejenuhan penulis dengan ajakan untuk bermain diluar bersama sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan penuh semangat dan keyakinan.
12. Kucing penulis yakni Catty yang tanpa lelah menyapa penulis ketika penulis pergi dan juga pulang disetiap harinya selama 12 tahun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, baik dari dosen pembimbing, teman-teman, maupun pembaca lainnya, guna memperbaiki dan menyempurnakan

karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bagi para pemangku kebijakan di Indonesia.

Surabaya, 13 Desember 2024



Rizqullah Rafif Ananda

NIM: 1312100053

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sebagai pengganti jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap dengan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD NRI 1945 dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diketahui kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, hal ini termuat dalam Pasal 17 UUD NRI 1945, artinya menteri berperan sebagai pejabat yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan hanya oleh Presiden. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh Presiden senantiasa agar tercipta penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban menteri adalah kepada Presiden. Dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan atau dalam satu kesatuan disebut "menteri triumvirat". Kedudukannya yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan disaat Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Menteri triumvirat pada dasarnya adalah menteri pada umumnya, hanya saja kedudukannya lebih kuat daripada menteri lainnya karena menteri triumvirat disebutkan dalam UUD NRI 1945. Sebagai pelaksana tugas kepresidenan yang menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Presiden, maka pertanggungjawaban menteri triumvirat terdiri dari pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban moral, dan pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci : Kedudukan, Pertanggungjawaban, Menteri Triumvirat.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the position and authority of the triumvirate ministers as acting presidential officials to replace the President and Vice President who are permanently incapacitated within the presidential system of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to explain the legal accountability of the triumvirate ministers as acting presidential officials in the event of the President and Vice President being permanently incapacitated. This research is a legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that it is known that the position of ministers is as assistants to the President, as stated in Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, meaning that ministers play the role of officials who assist the President in carrying out government duties. Ministers are appointed and dismissed solely by the President. The requirement for the appointment and dismissal of ministers by the President is always to ensure the administration of government duties, so the ministers are accountable to the President. In Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that the acting presidential duties are carried out by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense, collectively referred to as the "triumvirate ministers." Their position is as the acting presidential duties when the President and Vice President are permanently incapacitated. The triumvirate ministers are essentially ministers in general, but their position is stronger than other ministers because the triumvirate ministers are mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As the executor of presidential duties who carries out the rights, authority, and obligations of the President, the accountability of the triumvirate ministers consists of political accountability, moral accountability, and legal accountability.

Keywords: Position, Accountability, Triumvirate Minister.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	11
2.2. Konsep Kewenangan.....	17

2.3. Konsep Berhalangan Tetap.....	22
2.4. Konsep Triumvirat.....	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1. Kedudukan dan Kewenangan Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan dalam Hal Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap	29
3.1.1. Kedudukan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia	29
3.1.2. Kedudukan dan Kewenangan Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan	43
3.2. Pertanggungjawaban Hukum Menteri Triumvirat sebagai Pemegang Jabatan Sementara Presiden dan Wakil Presiden yang Berhalangan Tetap.....	63
3.2.1. Pertanggungjawaban Menteri dalam Sistem Presidensial.....	63
3.2.2. Pertanggungjawaban Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan.....	73
BAB IV PENUTUP	101
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran.....	102
DAFTAR BACAAN	105